

**PELINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA PRIMER KOPERASI TERHADAP
KERUGIAN YANG DITIMBULKAN AKIBAT ADANYA ANGGOTA KOPERASI
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI
DI KODAM XVI/PATTIMURA**

INTISARI

Oleh:

Achmad Daeng Leo¹ dan Hariyanto²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang upaya Primer Koperasi di kesatuan jajaran Kodam XVI/Pattimura dalam melindungi simpanan anggota koperasi apabila ada anggota koperasi yang melakukan Tindak Pidana Desersi dan tidak dapat ditemukan kembali dan mencari solusi apa yang menjadi hambatan bagi Primer Koperasi di kesatuan jajaran Kodam XVI/Pattimura dalam upaya melindungi simpanan anggota terhadap adanya anggota koperasi yang melakukan tindak pidana Desersi serta upaya yang harus dilakukan Kodam XVI/Pattimura dalam memberi perlindungan hukum sebagai jaminan terhadap modal koperasi yang diperoleh dari simpanan anggota guna mendukung dan memajukan koperasi TNI AD

Penelitian tesis ini merupakan penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi, yang digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan .

Hasil penelitian tesis dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan perlindungan terhadap modal anggota koperasi akibat adanya anggota koperasi lainnya yang melakukan tindak pidana desersi dan tidak kembali sebagai berikut : 1. adanya upaya yang dilakukan primer koperasi di satuan jajaran Kodam XVI/Pattimura yang meliputi : Pemberlakuan pembatasan hutang bagi anggota, rekomendasi dari komandan satuan tentang hutang yang dapat diambil dan pengalokasian dana cadangan untuk menutupi piutang tak terbayar serta melakukan upaya bisnis dengan kerjasama dengan pihak kedua yakni lembaga keuangan dan/atau badan usaha di luar instansi TNI AD; 2. Hambatan bagi primer koperasi di satuan jajaran Kodam XVI/Pattimura dalam upaya melindungi modal anggota adalah : Terbatasnya jumlah simpanan anggota yang diinvestasikan sebagai modal, tidak dapat mengambil dana milik prajurit desertir yang tersimpan di BP TWP dan PT. ASABRI sebagai upaya menutup piutang dari anggota Desertir tersebut, belum diberlakukan syarat administrasi berupa akta perikatan bagi anggota yang akan melakukan peminjaman di koperasi dan terbatasnya Sumber daya manusia pengurus dalam pemahaman tentang Hukum dan Bisnis dalam pengelolaan koperasi; dan. 3. Upaya dari pimpinan Kodam XVI/Pattimura untuk melakukan upaya sebagai berikut : 1. Menggalakkan program pembinaan hukum melalui satuan KUM DAM XVI/Pattimura kepada parajurit; 2. Memberi saran kepada pimpinan TNI AD untuk melakukan kerjasama dengan pihak BP TWP dan PT ASABRI terkait pengambil alihan dana prajurit yang melakukan tindak pidana Desersi dan tidak kembali guna menutupi hutang yang tertinggal di koperasi satuannya; 3.



**PELINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA PRIMER KOPERASI TERHADAP KERUGIAN YANG
DITIMBULKAN AKIBAT ADANYA
ANGGOTA KOPERASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI DI KODAM XVI/PATTIMURA**
Achmad Daeng Leo, DR Hariyanto, S.H., M.Kn.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Memerintahkan KUMDAM XVI/Pattimura melaksanakan program penyuluhan secara khusus kepada pengurus Koperasi tentang persoalan yuridis dalam menjalankan pengelolaan Koperasinya; dan 4. Berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Maluku untuk memberikan pembimbingan dan/atau penyuluhan kepada pengurus koperasi terutama terkait dengan bisnis dalam rangka peningkatan pendapatan usaha.

Kata Kunci: Primer Koperasi, Tindak Pidana Desersi, Modal Koperasi

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta) Universitas Gadjah Mada

² Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada

LEGAL PROTECTION FOR PRIMARY COOPERATIVE MEMBERS AGAINST DAMAGES
INCURRED RESULTING WITH COOPERATIVE MEMBERS WHO PERMIT THE CRIME OF
DESERVE AT KODAM XVI/PATTIMURA

ABSTRACT

By:

Achmad Daeng Leo¹ dan Hariyanto²

This study aims to find out and analyze the efforts of the Primary Cooperative in the XVI/Pattimura Military Command unit in protecting the savings of cooperative members if a member of the cooperative commits a crime of desertion and cannot be found again and find out what solutions are the obstacles for Primary Cooperatives in the unit ranks. Regional Military Command XVI/Pattimura in an effort to protect members' savings against cooperative members who commit desertion crimes as well as efforts that must be made by Regional Military Command XVI/Pattimura in providing legal protection as collateral for cooperative capital obtained from members' savings to support and advance TNI AD cooperatives

This thesis research is empirical research, namely research conducted with field data as the main data source, such as the results of interviews and observations, which are used to analyze law which is seen as patterned social behavior in people's lives that always interact and relate with social aspects

This thesis research is empirical research, namely research conducted using field data as the main data source, such as the results of interviews and observations, which are used to analyze law which is seen as patterned social behavior in people's lives which always interacts and is related to aspects society.

The results of the thesis research can be concluded that in protecting the capital of cooperative members due to the presence of other cooperative members who committed the crime of desertion and did not return as follows: 1. there were efforts made by the cooperative primary in the XVI/Pattimura Military Command unit which included: Implementation of debt restrictions for members, recommendations from the unit commander regarding debts that can be taken and the allocation of reserve funds to cover unpaid receivables as well as carrying out business efforts in collaboration with second parties, namely financial institutions and/or business entities outside the TNI AD agency; 2. Obstacles for primary cooperatives in the XVI/Pattimura Military Command unit in an effort to protect members' capital are: Limited amount of member savings invested as capital, unable to take funds belonging to deserted soldiers stored in BP TWP and PT. ASABRI, as an effort to cover receivables from the Deserter members, has not implemented administrative requirements in the form of a deed of engagement for members who wish to borrow from the cooperative and the management's human resources are limited in understanding Law and Business in managing cooperatives; And. 3. Efforts from the leadership of Kodam XVI/Pattimura to make the following efforts: 1. Promote legal development programs through the KUMDAM XVI/Pattimura unit for soldiers; 2. Providing advice to the TNI AD leadership to collaborate with BP TWP and PT ASABRI regarding taking over funds from soldiers who have not committed the crime of desertion and have not returned in order to cover the debts left in their unit cooperatives; 3. Ordered KUMDAM XVI/Pattimura to carry out a special outreach program to cooperative administrators regarding juridical issues. in carrying out the management of the Cooperative; and 4. Coordinate with the Maluku Province Department of Cooperatives and UMKM to provide guidance and/or counseling to cooperative administrators, especially related to business in order to increase business income.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Keywords:

**PELINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA PRIMER KOPERASI TERHADAP KERUGIAN YANG
DITIMBULKAN AKIBAT ADANYA
ANGGOTA KOPERASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI DI KODAM XVI/PATTIMURA**

Achmad Daeng Leo, DR Hariyanto, S.H., M.Kn.

Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Cooperative Primary, Desertion Crime, Cooperative Capital

.

Student of the Master of Law Study Program (Jakarta Campus), Universitas Gadjah Mada

² Lecturer of the Master of Law Study Program, Gadjah Mada University